

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5<sup>th</sup> edition. St. Paul Minn: West Publishing CO, 1979.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Martin, Elizabeth A., *Oxford Dictionary of Law*, Oxford University Press, 5<sup>th</sup> edition, 2002.
- Paul Marrett, *Information Law in Practicem* 2<sup>nd</sup> Edition, (Cornwall: MPG Books Ltd, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Rizky Karo-Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Rizky Karo-Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019).
- Safri Nugraha, *et.al, Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Sinta Dewi Rosadi, "Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional", (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Cyber Law: Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Makalah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006).

## JURNAL

Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Yustisia* Edisi 90, September-Desember, (2014): 136-142, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.

Ajisatria Suleiman, “Kajian Pemenuhan Akses terhadap Data dan Sistem dari Penyelenggara Sistem Elektronik oleh Kementerian, Lembaga Pengawas, dan Aparat Penegak Hukum”, *Makalah Kebijakan* No. 39, Center for Indonesian Policy Studies, September (2021).

Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1, (2016): 37-53, DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

Erli Salia, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”, *Jurnal UM Palembang*, (2017).

Franciscus Xaverius Wartoyo, “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional”, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April (2016): 216-230, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.

Glenn Wijaya, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”, *Law Review Volume XIX*, Nomor 3, Maret (2020): 326-361, DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>.

Haerunnisa, Adrian Permana, dan Ricky Firmansyah, “Peranan Smartphone dalam Dunia Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, Desember (2020): 140-146, DOI: <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i2.460>.

Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni (2020): 1-14, DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Jurnal ‘Adalah*, Vol. 4, No. 3, (2020): 37-48, DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16200.

M.A. Ghufron, “Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang dan Solusi bagi Dunia Pendidikan”, *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Jakarta, 2 Agustus (2018): 332-337.

Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber, SASI Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret (2021): 38-52.

Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Januari – April (2016): 22-30, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

Tanzil Kurmiawan, Anang Setiyawan, Woro Winandi, “Perbandingan Kebijakan Sistem *Big Data* di Indonesia dan Uni Eropa”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember (2020): 119-130, DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1514>.

### **SKRIPSI**

Amangku Putradewa Bagaskoro Satiman, “Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa Berdasarkan *General Data Protection Regulation*”. Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020.

Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing System* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

### **WEBINAR**

Webinar Nasional “Literasi Mekanisme Persetujuan Data Pribadi” yang diadakan pada 21 Oktober 2021, melalui media Zoom Meeting.

Webinar Nasional “Menakar Implementasi Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi” yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2021, melalui media Zoom Meeting.

Webinar Nasional “Menelaah Data Pribadi: Definisi, Tipe Data dan Kebijakan Peperlindungan” yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2021, melalui media Zoom Meeting.

### **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), yang diwakilkan oleh Nenden Sekar Arum dari divisi Freedom of Expression. Wawancara diadakan pada tanggal 6 Oktober 2021, melalui Google Meet, pada pukul 13.00 WIB.

## INTERNET

AFP, “230 Ribu Data Pasien Covid-19 di Indonesia Bocor dan Dijual”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192-515418/230-ribu-data-pasien-covid-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual>, diakses pada 2 November 2021.

Conney Stephanie, “7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020”. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diakses pada 27 Juli 2021.

European Data Protection Supervisor, “The History of the General Data Protection Regulation”. [https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation\\_en](https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en), diakses pada 29 Juli 2021.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 28 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akses”. <https://kbbi.web.id/akses>, diakses 1 pada Agustus 2021.

\_\_\_\_\_, “Penyelenggara”. <https://kbbi.web.id/selenggara>, diakses pada 1 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_, “Wewenang”. <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada 1 Agustus 2021.

Kominfo, “Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi”. [https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita_satker), diakses pada 10 September 2021.

Made Anthony Iswara, “Perlindungan Data Pribadi Lemah, Kebocoran Data Merajalela”. <https://tirto.id/perlindungan-data-pribadi-lemah-kebocoran-data-merajalela-gjH6>, diakses pada 2 November 2021.

Mohammad Bernie, “91 Juta Data Pengguna Tokopedia Bocor dan Disebar di Forum Internet”. <https://tirto.id/91-juta-data-pengguna-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet-fNH1>, diakses pada 27 Juli 2021.

Roy Franedyta, “1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf>, diakses pada 27 Juli 2021.

SAFEnet Voice, “[Kertas Posisi] Analisis atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat”. <<https://id.safenet.or.id/2021/05/kertas-posisi-analisis-atas-permenkominfo-no-5-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sistem-elektronik-lingkup-privat/>>, diakses pada 27 Juli 2021.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah”. <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all>, diakses pada 27 Juli 2021.

Wahyuni Sahara, “Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi dalam Dua Tahun Terakhir”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all>, diakses pada 2 November 2021.

World Health Organization, “WHO Announces COVID-19 Outbreak a Pandemic”. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>, diakses pada 10 September 2021.

Yusuf, “Ketentuan PSE Lingkup Privat untuk Lindungi Negara dan Masyarakat”. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/ketentuan-pse-lingkup-privat-untuk-lindungi-negara-dan-masyarakat/>, diakses pada 27 Juli 2021.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi

General Data Protection Regulation

International Covenant on Civil Political Rights

European Convention of Human Rights

Data Protection Act 1998

